

**TESIS**

**UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA DI KANTOR NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



**Oleh:**

**FUAD RAHMAN  
NIM. 2320216310007**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN**

**2025**

**TESIS**

**UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA DI KANTOR NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



**Oleh:**

**FUAD RAHMAN  
NIM. 2320216310007**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN**

**2025**

**UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA DI KANTOR NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**FUAD RAHMAN  
NIM. 2320216310007**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN**

**2025**

**Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal....**

**Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Menyetujui Koordinator Program Studi  
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Efliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Chamad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

#### Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FUAD RAHMAN

NIM : 2320216310007

Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan

FUAD RAHMAN

NIM. 2320216310007



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**FUAD RAHMAN**  
**2320216310007**

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**6 %**

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Mengetahui,  
As. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA DI KANTOR NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.**

**Oleh:**

**Fuad Rahman<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 halaman.**

**RINGKASAN**

Permasalahan pembayaran upah kerja lembur masih menjadi persoalan klasik namun serius dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, terlebih di sektor-sektor kerja non-industri seperti perkantoran notaris. Kantor notaris yang berperan sebagai lembaga jasa hukum pada praktiknya melibatkan tenaga kerja yang memiliki beban kerja tinggi, terutama ketika menghadapi tenggat pembuatan akta, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Namun sayangnya, hak-hak normatif pekerja, terutama dalam bentuk upah lembur, seringkali tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Realitas ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja kantor notaris sebagai penerima kerja. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja telah menegaskan perlindungan terhadap hak lembur pekerja, dalam praktiknya banyak notaris yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku, baik karena ketidaktahuan terhadap norma hukum ketenagakerjaan maupun karena persepsi keliru tentang kedudukan notaris sebagai profesi yang tidak tunduk secara penuh pada rezim hukum ketenagakerjaan. Situasi ini menciptakan kekosongan pemahaman hukum mengenai kewajiban notaris dalam konteks hubungan kerja, khususnya terkait pembayaran upah lembur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam karakteristik hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja di kantor notaris, dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran upah lembur, serta untuk menguraikan tanggung jawab hukum notaris terhadap hak pekerja atas lembur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik mengenai penafsiran tanggung jawab keperdataan, administratif, dan etik yang melekat pada profesi notaris dalam praktik hubungan kerja. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks profesi yang tidak lazim diasosiasikan dengan pengusaha konvensional, seperti notaris. Selain itu, kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan hukum

---

<sup>1</sup>NIM. 2320216310007

<sup>2</sup>Pembimbing Utama.

kepada notaris maupun pekerja mengenai struktur hubungan kerja yang adil dan pemenuhan kewajiban pembayaran upah lembur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan di sektor jasa profesional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan preskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, doktrin hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait hubungan kerja dan pembayaran upah lembur. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan tesis terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada argumentasi sistematis dan logis untuk menyusun kesimpulan normatif. Dalam penelitian ini juga digunakan kerangka konseptual berupa Teori Hubungan Kerja dan Teori Keadilan Distributif untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum notaris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara notaris dan pekerja di kantor notaris termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Oleh karena itu, pekerja kantor notaris berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk hak atas upah lembur. Karakteristik hubungan kerja ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif yang mewajibkan pemberi kerja untuk membagi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kontribusi dan beban kerja. Dalam konteks ini, kewajiban pembayaran upah lembur merupakan bentuk konkret dari distribusi keadilan dalam relasi industrial antara notaris dan pekerjanya. Lebih lanjut, notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum atas pembayaran upah lembur secara multidimensi. Secara keperdataan, notaris dapat digugat karena wanprestasi apabila lalai membayar upah lembur yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Secara administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh pengawas ketenagakerjaan karena melanggar ketentuan normatif waktu kerja dan istirahat. Sementara itu, secara etik dan moral, notaris yang mengabaikan hak pekerja dianggap melanggar prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak pekerja atas upah lembur di kantor notaris memerlukan sinergi antara kepatuhan normatif, integritas profesional, dan pengawasan yang efektif. Dalam jangka panjang, kesadaran hukum notaris terhadap tanggung jawab ketenagakerjaan harus ditumbuhkan melalui pendidikan etik profesi dan penguatan lembaga pengawas

# **UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA DI KANTOR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.**

**Oleh:**

**Fuad Rahman<sup>3</sup>, Saprudin<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Upah Kerja Lembur, Kantor Notaris, Undang-Undang Cipta Kerja.**

Penelitian ini berjudul “Upah Kerja Lembur Pekerja di Kantor Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan kerja antara notaris dan pekerja serta menguraikan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembayaran upah lembur. Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan akademik dalam hukum ketenagakerjaan dan memberikan kontribusi praktis bagi pelaku profesi kenotariatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif.

Permasalahan pertama yang dikaji adalah mengenai karakteristik hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran upah lembur. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan kerja di kantor notaris memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja kantor notaris berhak atas perlindungan hukum termasuk hak atas upah kerja lembur, yang wajib dipenuhi oleh notaris sebagai pemberi kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Permasalahan kedua membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap pembayaran upah kerja lembur. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek keperdataan (wanprestasi), administratif (sanksi dari pengawas ketenagakerjaan), dan etik (pelanggaran terhadap kode etik profesi). Notaris yang tidak membayar upah lembur dapat dianggap melanggar kewajiban hukum normatif dan etik profesi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di lingkungan notaris sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pekerja.

---

<sup>3</sup>NIM. 2320216310007

<sup>4</sup>Pembimbing Utama.

**OVERTIME WAGES OF EMPLOYEES IN NOTARY OFFICES UNDER  
THE JOB CREATION LAW**

**By:**

**Fuad Rahman<sup>5</sup>, Saprudin<sup>6</sup>**

**Notarial Masters Program, Lambung Mangkurat University, 109 pages.**

**ABSTRACT**

**Keywords: Overtime Wages, Notary Office, Job Creation Law.**

*This thesis, titled “Overtime Wages of Employees in Notary Offices under the Job Creation Law”, aims to analyze the characteristics of the employment relationship between notaries and their employees and to explain the legal responsibilities of notaries regarding the payment of overtime wages. This study is useful for enriching academic perspectives in labor law and offers practical contributions to the professional practice of notaries. The research employs normative legal methods with a prescriptive approach, utilizing primary and secondary legal materials, and is analyzed qualitatively.*

*The first issue examined is the nature of the employment relationship between notaries as employers and employees in relation to their obligation to pay overtime wages. The findings indicate that the employment relationship in notary offices fulfills the elements of work, command, and wages as defined in labor law. Therefore, employees in notary offices are entitled to legal protection, including the right to overtime wages, which must be provided by the notary as the employer in accordance with the Job Creation Law and its implementing regulations.*

*The second issue discusses the responsibility of notaries in fulfilling overtime wage payments. Such responsibility includes civil aspects (breach of contract), administrative aspects (sanctions from labor inspectors), and ethical aspects (violations of professional codes of conduct). Notaries who fail to pay overtime wages may be considered in violation of both legal obligations and professional ethics. Therefore, increasing legal awareness and monitoring employment practices in notary offices are essential to ensure justice and legal certainty for workers.*

---

<sup>5</sup>NIM. 2320216310007

<sup>6</sup>Pembimbing Utama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Upah Kerja Lembur Pekerja di Kantor Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2023 Program Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis

Fuad Rahman

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i

HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS .....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	44
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	51
<b>BAB II KARAKTERISTIK HUBUNGAN KERJA ANTARA NOTARIS SEBAGAI PEMBERI KERJA DAN PEKERJA TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR.....</b>	<b>53</b>
A. Kedudukan Hukum Notaris sebagai Pemberi Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.....	53
B. Unsur-Unsur Hubungan Kerja antara Notaris dan Pekerja	62
C. Kewajiban Pembayaran Upah Kerja Lembur oleh Notaris	68
<b>BAB III BENTUK TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR DI KANTOR NOTARIS.....</b>	<b>78</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Notaris Dalam Hubungan Kerja.....	78
B. Tanggung Jawab Administratif Notaris terhadap Pelanggaran Hak Normatif Pekerja.....	90
C. Tanggung Jawab Etik dan Moral Notaris sebagai Profesional dalam Memberikan Keadilan Ketenagakerjaan.	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108

## DAFTAR PUSTAKA